

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai Implementasi Kebijakan PP No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS di BKD Provinsi NTT, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ukuran-ukuran Dasar dan Tujuan Kebijakan

Setelah melakukan penelitian di BKD Provinsi NTT terkait pelaksanaan PP No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS, peneliti melihat standar keberhasilan pelaksanaan PP No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS di BKD Provinsi NTT yaitu bertambahnya kesadaran diri setiap PNS di lingkup BKD Provinsi NTT agar selalu mengutamakan aspek kedisiplinan dalam menjalankan setiap tugas dan fungsi masing-masing. Perilaku disiplin yang senantiasa dijalankan secara konsisten diharapkan dapat semakin mengurangi pelanggaran indisipliner setiap tahunnya. Peraturan pemerintah ini juga dapat dikatakan berhasil dilaksanakan ketika menghasilkan perubahan sikap PNS dari yang sebelumnya kurang disiplin menjadi lebih disiplin saat PP ini diberlakukan di BKD Provinsi NTT.

Adapun tujuan dari pelaksanaan PP ini adalah meningkatkan kedisiplinan dari setiap PNS di lingkup BKD Provinsi NTT dalam tugas pokok dan fungsi masing-masing PNS. Sikap disiplin yang tertuang dalam PP no. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS ini merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap PNS di BKD Provinsi NTT.

Tabel 6.1 Hasil Penelitian Atas Dimensi Ukuran Dan Tujuan Kebijakan

No.	Kriteria Penilaian	Aspek yang Diukur	Kategori
1.	Ukuran dan Tujuan	1. Standar keberhasilan pelaksanaan PP No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS di BKD Provinsi NTT	Terdapat kesesuaian antara yang dijelaskan informan dan PP 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS. Contoh kesesuaian ini dapat dilihat dari pelaksanaan jam masuk-keluar kantor dan tanggungjawab dalam setiap tugas yang dilaksanakan oleh staf BKD Provinsi NTT
		2. Tujuan Pelaksanaan PP No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS di BKD Provinsi NTT	Terdapat kesesuaian antar penjelasan informan, isi PP No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS, dan pelaksanaan PP ini di BKD Provinsi NTT dalam rangka menegakan disiplin PNS pada BKD sendiri.

(Sumber: Olahan Peneliti, 2021).

2. Sumber Daya

Ada tiga sumber daya yang menjadi fokus penelitian kali ini. Pertama sumber daya manusia, dari hasil penelitian diketahui bahwa sumber daya manusia yang dimiliki oleh BKD Provinsi NTT dalam pelaksanaan PP No. 53 Tahun 2020 sudah mendukung dengan klasifikasi pendidikan pada jenjang Starata Satu(S1), Strata Dua(S2), Diploma, SLTA, dan SLTP. Kedua dari sumber daya fasilitas (sarana dan prasarana) dalam pelaksanaan PP No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS di BKD sudah mendukung dengan adanya absensi online dalam hal ini mesin *finger print*, komputer, printer. Ketiga dari sumber daya finansial, BKD Provinsi NTT sudah mengalokasikan setiap tahunnya dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) untuk pelaksanaan PP No.

53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS dengan untuk kegiatan-kegiatan seperti sosialisasi, sidak, dan pembinaan pegawai.

Tabel 6. 2 Hasil Penilaian Atas Dimensi Sumber Daya

No.	Kriteria Penilaian	Aspek yang Diukur	Kategori
1.	Sumber Daya Manusia	Sumber Daya Manusia Dalam Pelaksanaan PP No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS di BKD Provinsi NTT	Baik dan Memadai
2.	Sumber Daya Sarana dan Prasarana	Sarana dan Prasarana Dalam Pelaksanaan PP No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS di BKD Provinsi NTT	Tersedia
3.	Sumber Daya Dana	Dana/finansial Dalam Pelaksanaan PP NO. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS di BKD Provinsi NTT	Tersedia

(Sumber: Olahan Peneliti, 2021)

3. Karakteristik Instansi Pelaksana

Sesuai dengan hasil wawancara peneliti melihat bahwa peran *stake holder* dalam pelaksanaan PP No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS di BKD Provinsi NTT dilaksanakan secara berjenjang mulai dari atasan langsung PNS bersangkutan sampai ke pejabat Pembina Kepegawaian yang lebih tinggi sesuai tingkat pelanggaran disiplin yang dilakukan PNS tersebut.

Pada proses pelaksanaan PP No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS di BKD Provinsi NTT sendiri sudah dilaksanakan. Namun dalam proses pelaksanaan ini belum berjalan baik, karena masih ada oknum tertentu yang melakukan perilaku indisipliner. Para PNS juga harus selalu diingatkan untuk berperilaku disiplin setiap hari agar seluruh tugas dapat terlaksana dengan baik.

Tabel 6. 3 Hasil Penilaian Atas Dimensi Karakteristik Agen Pelaksana

No	Kriteria Penilaian	Aspek yang Diukur	Kategori
	Karakteristik Agen Pelaksana	Peran Stakeholder dalam Pelaksanaan PP No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS di BKD Provinsi NTT.	Baik, dilakukan secara berjenjang mulai dari atas langsung PNS.
		Pelaksana PP No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS di BKD Provisinsi NTT.	Sudah dilaksanakan namun belum berjalan optimal.

(Sumber: Olahan Peneliti, 2021)

4. Komunikasi Antara Organisasi

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa telah berlangsung koordinasi yang baik dan berkelanjutan antara staf dan atasan di BKD Provinsi NTT. Koordinasi ini berlangsung dalam rangka pelaksanaan PP No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai yang tepat sasaran dan membawa dampak baik, berupa sikap disiplin dari semua PNS di lingkup BKD. Koordinasi ini terwujud dalam diskusi-diskusi antara atasan dan bawahan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan terkait pelaksanaan PP No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS di BKD Provinsi NTT.

Proses sosialisasi juga dilaksanakan sebelum dan saat Peraturan Pemerintah ini diterapkan. Proses sosialisasi ini dilakukan baik oleh Kepala Bidang Disiplin dan Korpri maupun oleh Kepala BKD sendiri. Sosialisasi ini dilakukan melalui surat-surat maupun melalui sosial media secara khusus di chanel Youtube BKD Provinsi NTT. Proses sosialisasi ini bukan hanya sekedar dilakukan di lingkup BKD sendiri melainkan juga di Organisasi Perangkat Daerah lainnya. Bentuk lain dari sosialisasi PP ini oleh BKD Provinsi NTT peneliti temukan dalam website *bkd.nttprov.go.id*, dalam bentuk buku yang dapat diunduh oleh semua pegawai secara gratis. Buku ini berjudul Buku Pintar Disiplin PNS yang

dalam salah satu bab menjelaskan tentang PP No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS.

Tabel 6.4 Hasil Penilaian Atas Dimensi Komunikasi Antar Organisasi

No	Kriteria Penilaian	Aspek yang Diukur	Kategori
1.	Komunikasi Antar Organisasi	Koordinasi antar Staf dan Atasan Dalam Pelaksanaan PP No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS di BKD Provinsi NTT.	Berlangsung terus-menerus dan berkelanjutan.
		Sosialisasi PP No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS di BKD Provinsi NTT.	Disosialisasikan kepada seluruh Staf di lingkup BKD Provinsi melalui berbagai media seperti surat, Buku Pintar Disiplin, dan media sosial seperti Youtube.

(Sumber: Olahan Peneliti, 2021).

5. Disposisi (kecenderungan) Pelaksana

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan terkait respon kelompok sasaran, dalam hal ini PNS di BKD provinsi NTT dengan dilaksankannya PP No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS, ditarik sebuah kesimpulan bahwa para staf dan pimpinan di BKD Provinsi NTT, memberikan respon positif akan hadirnya PP no. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS. PP ini dilihat sebagai pedoman bagi semua PNS di lingkup BKD Provinsi NTT agar dapat bersikap dan bekerja disiplin. Disiplin yang dimaksudkan disini seperti disiplin masuk-keluar kantor dan juga disiplin dalam menyelesaikan tugas-tugas setiap harinya. Untuk konteks pengetahuan dan pemahaman atas PP ini, peneliti menyimpulkan bahwa staf BKD sudah seharusnya paham dan mengetahui isi PP ini. Hal ini berkaitan langsung dengan adanya sosialisasi dari bidang disiplin bagi seluruh staf terkait isi PP ini. Referensi lain tentang isi PP ini juga dapat dibaca dalam Buku Pintar

Disiplin PNS yang dapat dilihat dalam website resmi BKD juga. Pernyataan dari hasil wawancara diatas cukup mewakili sejauh mana pengetahuan dan pemahaman staf BKD atas PP ini.

Tabel 6.5 Hasil Penilaian Atas Dimensi Disposisi Pelaksana

No	Kriteria Penilaian	Aspek yang Diukur	Kategori
1	Disposisi Pelaksana	Pengetahuan dan Pemahaman Pelaksana Terhadap Pelaksanaan PP No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS di BKD Provinsi NTT	Mengetahui dan memahami PP ini dari sosialisasi dan Buku Pintar Disiplin PNS
		Respon atau Tanggapan Staf BKD terkait Pelaksanaan PP No. 52 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS di BKD Provinsi NTT	Menerima pelaksanaan PP ini di BKD Provinsi NTT

(Sumber: Olahan Peneliti, 2021).

6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

Dapat dikatakan bahwa intervensi politik tidak terjadi dalam pelaksanaan PP No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS tentang Disiplin PNS di BKD Provinsi NTT. Sedangkan dari aspek sosial dan ekonomi peneliti menemukan ada pengaruh terhadap pelaksanaan PP No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS di BKD Provinsi NTT.

Tabel 6.6 Hasil Penilaian

Dimensi Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

No	Kriteria Penilaian	Aspek yang Diukur	Kategori
1	Lingkungan Sosial	Sosial	Mempengaruhi
2	Lingkungan Ekonomi	Ekonomi	Mempengaruhi
3	Lingkungan Politik	Politik	Tidak mempengaruhi

(Sumber: Olahan Peneliti, 2021).

6.2 Saran

Peneliti memberikan saran terhadap BKD Provinsi NTT agar:

- Melakukan sosialisasi secara berkala kepada seluruh staf di lingkup BKD Provinsi NTT terkait PP No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS agar lebih memahami dan mengetahui serta melaksanakan isi PP ini secara benar dan baik
- Melakukan evaluasi secara berkala kepada setiap PNS di lingkup BKD Provinsi NTT terkait perilaku disiplin agar dapat melihat sejauh mana pemahaman dan pelaksanaan PP No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS oleh para staf BKD tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Fathoni. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Agustino, Leo. 2007. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabeta
- Anderson, J. 1990. *Public Policymaking: An Introduction*. Boston: Houghton Mifflin.
- BKD.nttprov.go.id
- Dye, Thomas R. 1992. *Understanding Public Policy*, 7th Ed. New York: Prentice Hall.
- Dasimah, Imas. 2014. *Pengaruh Implementasi Kebijakan PP No 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Terhadap Kinerja Pegawai di Kementrian Kota Bandung*. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati.
- Edward, G. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quartely Inc.
- Grindle, M. S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*. New Jersey: Princetown University Press.
- Handoko, H. 2011. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Hanif, Muhamad. 2017. *Implementasi Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di UPT Perpustakaan*. Universitas Negeri Jakarta.

- Hartini dkk, S. 2011. *HukumKepegawaian di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasibuan, M. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- <https://amp.kompas.com/regional/read/2019/01/07/10492441/tak-disiplin-dalam-bekerja-143-asn-di-ntt-kenakan-rompi-oranye-saat-apel> diakses Rabu, 24 Maret 2021
- Hogwood, B.W. dan L. A. Gunn. 1984. *Policy Analysis For The Real World*. Oxford University Press.
- Ig, Wursanto. 2004. *Dasar-Dasar Ilmu Organisasi Kepegawaian*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Lester, James, P, Stewart, Joseph. 2000. *Public Policy An Evolutionary Approach Wadsworth: Stamford USA*.
- Mazmanian, Daniel H, Paul A. Sabatier. 1983. *Implementation and Policy*. New York: Harper Collins.
- Memed Erwansyah, Hj. Sulastini, Hereyanto. 2018. *Pengaruh Kompetensi, Disiplin Kerja, Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai (Survei pada PT Bank Negara Indonesia(Persero) Tbk Kantor Cabang Muara Teweh Kabupaten Barito Utara)*. *Jurnal Bisnis dan Pembangunan, Edisi Januari-Juni 2018, Vol 7 No. 1, diakses tanggal 12 Maret 2021*.
- Mifta, Thoha. 2012. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Implikasinya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Milis, Matthew B. and A. Michael Huberman. 2005. *Qualitative Data Analysis* (terjemahan). Jakarta: UI Press.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Van Meter, Donald. dan Van Horn, Carl. 1975. *The Policy Implementation Process: Conceptual Framework*. Administration Society: Sage Publucation, Inc.
- Widodo, W.S. 1980. *Administrasi Kepegawaian*. Yogyakarta: BPA, UGM.
- Widjaja. 2011. *Etika Pemerintahan Jakarta*. Jakarta: Bumi Aksara.

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pedoman Wawancara dengan Kepala BKD Provinsi NTT

- ❖ Menurut Bapak/Ibu seperti apa standar keberhasilan implementasi PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS di BKD Provinsi NTT?
- ❖ Menurut Bapak/Ibu apa tujuan diterapkannya PP No.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS di BKD Provinsi NTT?
- ❖ Bagaimana dukungan sumber daya manusia dalam proses implementasi PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS di BKD Provinsi NTT?
- ❖ Bagaimana ketersediaan dana/finansial dalam proses implementasi PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS di BKD Provinsi NTT?
- ❖ Bagaimana ketersediaan sarana-prasarana dalam mendukung proses implementasi PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS di BKD Provinsi NTT?
- ❖ Apa tugas dan wewenang Bapak/Ibu terkait pelaksanaan PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS di BKD Provinsi NTT?
- ❖ Bagaimana pelaksanaan PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS di BKD Provinsi NTT?
- ❖ Apakah telah berlangsung koordinasi antara atasan dan staf dalam proses pengimplementasian PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS di BKD Provinsi NTT?
- ❖ Sebelum PP ini diterapkan, apakah pernah dilaksanakan sosialisasi di BKD provinsi NTT terkait PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS?
- ❖ Seberapa dalam pengetahuan dan pemahaman para pimpinan dan staf terkait PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS di BKD Provinsi NTT?

- ❖ Seperti apa respon para Pegawai atas diterapkannya PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS di BKD Provinsi NTT?
- ❖ Adakah pengaruh dari faktor sosial, ekonomi, dan politik dalam penerapan PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS di BKD Provinsi NTT?

B. Pedoman Wawancara dengan Sekretaris BKD Provinsi NTT

- ❖ Menurut Bapak/Ibu seperti apa standar keberhasilan implementasi PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS di BKD Provinsi NTT?
- ❖ Menurut Bapak/Ibu apa tujuan diterapkannya PP No.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS di BKD Provinsi NTT?
- ❖ Bagaimana dukungan sumber daya manusia dalam proses implementasi PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS di BKD Provinsi NTT?
- ❖ Bagaimana ketersediaan dana/finansial dalam proses implementasi PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS di BKD Provinsi NTT?
- ❖ Bagaimana ketersediaan sarana-prasarana dalam mendukung proses implementasi PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS di BKD Provinsi NTT?
- ❖ Apa tugas dan wewenang Bapak/Ibu terkait pelaksanaan PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS di BKD Provinsi NTT?
- ❖ Bagaimana pelaksanaan PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS di BKD Provinsi NTT?
- ❖ Apakah telah berlangsung koordinasi antara atasan dan staf dalam proses pengimplementasian PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS di BKD Provinsi NTT?
- ❖ Sebelum PP ini diterapkan, apakah pernah dilaksanakan sosialisasi di BKD provinsi NTT terkait PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS?

- ❖ Seberapa dalam pengetahuan dan pemahaman para pimpinan dan staf terkait PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS di BKD Provinsi NTT?
- ❖ Seperti apa respon para Pegawai atas diterapkannya PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS di BKD Provinsi NTT?
- ❖ Adakah pengaruh dari faktor sosial, ekonomi, dan politik dalam penerapan PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS di BKD Provinsi NTT?

C. Pedoman Wawancara dengan Kepala Bidang Disiplin dan Korpri BKD Provinsi NTT

- ❖ Menurut Bapak/Ibu seperti apa standar keberhasilan implementasi PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS di BKD Provinsi NTT?
- ❖ Menurut Bapak/Ibu apa tujuan diterapkannya PP No.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS di BKD Provinsi NTT?
- ❖ Bagaimana dukungan sumber daya manusia dalam proses implementasi PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS di BKD Provinsi NTT?
- ❖ Bagaimana ketersediaan dana/finansial dalam proses implementasi PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS di BKD Provinsi NTT?
- ❖ Bagaimana ketersediaan sarana-prasarana dalam mendukung proses implementasi PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS di BKD Provinsi NTT?
- ❖ Apa tugas dan wewenang Bapak/Ibu terkait pelaksanaan PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS di BKD Provinsi NTT?
- ❖ Bagaimana pelaksanaan PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS di BKD Provinsi NTT?
- ❖ Apakah telah berlangsung koordinasi antara atasan dan staf dalam proses pengimplementasian PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS di BKD Provinsi NTT?

- ❖ Sebelum PP ini diterapkan, apakah pernah dilaksanakan sosialisasi di BKD provinsi NTT terkait PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS?
- ❖ Seberapa dalam pengetahuan dan pemahaman para pimpinan dan staf terkait PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS di BKD Provinsi NTT?
- ❖ Seperti apa respon para Pegawai atas diterapkannya PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS di BKD Provinsi NTT?
- ❖ Adakah pengaruh dari faktor sosial, ekonomi, dan politik dalam penerapan PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS di BKD Provinsi NTT?

D. Pedoman Wawancara dengan Kepala Sub Bidang Disiplin Pegawai BKD Provinsi NTT

- ❖ Menurut Bapak/Ibu seperti apa standar keberhasilan implementasi PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS di BKD Provinsi NTT?
- ❖ Menurut Bapak/Ibu apa tujuan diterapkannya PP No.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS di BKD Provinsi NTT?
- ❖ Bagaimana dukungan sumber daya manusia dalam proses implementasi PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS di BKD Provinsi NTT?
- ❖ Bagaimana ketersediaan dana/finansial dalam proses implementasi PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS di BKD Provinsi NTT?
- ❖ Bagaimana ketersediaan sarana-prasarana dalam mendukung proses implementasi PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS di BKD Provinsi NTT?
- ❖ Apa tugas dan wewenang Bapak/Ibu terkait pelaksanaan PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS di BKD Provinsi NTT?
- ❖ Bagaimana pelaksanaan PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS di BKD Provinsi NTT?

- ❖ Apakah telah berlangsung koordinasi antara atasan dan staf dalam proses pengimplementasian PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS di BKD Provinsi NTT?
- ❖ Sebelum PP ini diterapkan, apakah pernah dilaksanakan sosialisasi di BKD provinsi NTT terkait PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS?
- ❖ Seberapa dalam pengetahuan dan pemahaman para pimpinan dan staf terkait PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS di BKD Provinsi NTT?
- ❖ Seperti apa respon para Pegawai atas diterapkannya PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS di BKD Provinsi NTT?
- ❖ Adakah pengaruh dari faktor sosial, ekonomi, dan politik dalam penerapan PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS di BKD Provinsi NTT?

E. Pedoman Wawancara dengan para staf BKD Provinsi NTT

- ❖ Menurut Bapak/Ibu seperti apa standar keberhasilan implementasi PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS di BKD Provinsi NTT?
- ❖ Menurut Bapak/Ibu apa tujuan diterapkannya PP No.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS di BKD Provinsi NTT?
- ❖ Bagaimana dukungan sumber daya manusia dalam proses implementasi PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS di BKD Provinsi NTT?
- ❖ Bagaimana ketersediaan dana/finansial dalam proses implementasi PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS di BKD Provinsi NTT?
- ❖ Bagaimana ketersediaan sarana-prasarana dalam mendukung proses implementasi PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS di BKD Provinsi NTT?
- ❖ Apa tugas dan wewenang Bapak/Ibu terkait pelaksanaan PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS di BKD Provinsi NTT?

- ❖ Bagaimana pelaksanaan PP No53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS di BKD Provinsi NTT?
- ❖ Apakah telah berlangsung koordinasi antara atasan dan staf dalam proses pengimplementasian PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS di BKD Provinsi NTT?
- ❖ Sebelum PP ini diterapkan, apakah pernah dilaksanakan sosialisasi di BKD provinsi NTT terkait PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS?
- ❖ Seberapa dalam pengetahuan dan pemahaman para pimpinan dan staf terkait PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS di BKD Provinsi NTT?
- ❖ Seperti apa respon para Pegawai atas diterapkannya PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS di BKD Provinsi NTT?
- ❖ Adakah pengaruh dari faktor sosial, ekonomi, dan politik dalam penerapan PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS di BKD Provinsi NTT?

DOKUMENTASI



Foto 1: Wawancara bersama Bpk. Octa Grandy Floris Angi, SH., selaku Sekretaris BKD Provinsi NTT pada tanggal 18/05/2021.



Foto 2: Wawancara bersama Ibu Carolina Maria A. Ondok, SH., selaku Kabid Disiplin dan KORPRI BKD Provinsi NTT, pada tanggal 17/05/2021.



Foto 3: Wawancara bersama Bpk. Yohanes M. V. P. R. Goring, SH., selaku Kasubid Disiplin Pegawai BKD Provinsi NTT pada tanggal 11/05/2021.



Foto 4: Wawancara bersama Bpk. Krisantus O. P. N. Metboki, S.Fil., selaku Kasubag Kepegawaian dan Umum BKD Provinsi NTT pada tanggal 20/05/2021.



Foto 5: Wawancara bersama Bpk. Yohanes M. S. Lawalu, SH., selaku Staf BKD Provinsi NTT pada tanggal 11/05/2021.



Foto 6: Wawancara bersama Bpk. Malesia Dere, selaku Staf BKD Provinsi NTT pada tanggal 11/05/2021.



Foto 7: Wawancara bersama Ibu Solfina Langgar, selaku Staf BKD Provinsi NTT, pada tanggal 11/05/2021.



Gambar 1: Cover Buku Pintar Displin PNS <https://bkd.nttprov.go.id/sites/default/files/2019-04/BUKU-PINTAR-DISIPLIN.pdf>



Gambar 2: Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT.